

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, LAIN-LAIN
PENDAPATAN YANG SAH, DAN DANA PERIMBANGAN
DAERAH TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN
BELANJA MODAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun)



Oleh :

SUTIRAH

Nim : 4318098

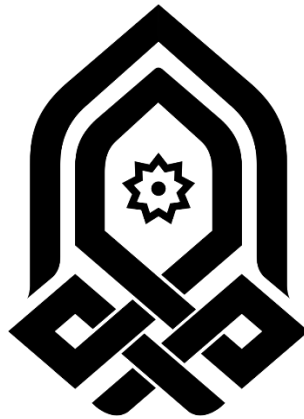
**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2022

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, LAIN-LAIN
PENDAPATAN YANG SAH, DAN DANA PERIMBANGAN
DAERAH TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN
BELANJA MODAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun)



Oleh :

SUTIRAH

Nim : 4318098

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutirah

NIM : 4318098

Judul Skripsi : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Sutirah

NOTA PEMBIMBING

Ria Anisatus Sholihah

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sutirah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Jurusan Akuntansi Syariah
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan makalah skripsi Saudara :

Nama : Sutirah
NIM : 4318098
Judul Skripsi : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

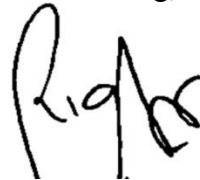
Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 Maret 2022

Pembimbing,



Ria Anisatus Sholihah, M.S.A, CA.
NIDN.2030068705



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Sutirah

NIM : 4318098


Judul Skripsi : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**


Telah diajukan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II


Dr. Tamamudin, S.E, M.M
NIP. 19791030 200604 1 018


Ahmad Rosyid, M.Si
NIP. 19790331 200604 1 003

Pekalongan, 10 Mei 2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H.M.H.

NIP. 197502201999032001

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi prasyarat dalam memperoleh gelar sarjana S. Akun di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tau tercinta mami Suci dan bapak Darsono
2. Keluarga besar saya terkhusus untuk Kakak-kakak tercinta
3. Almamater saya jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan
4. Dosen Pembimbing Ibu Ria Anisatus Sholihah, M.S.A, CA
5. Dosen Wali Alvita Tyas Dwi Aryani, M.Si
6. Sahabat saya Winarti, Fika Faradila, dan Siti Nurjanah
7. Teman-Teman seperjuangan Putri Damar Pengestika, Indi Aini Shikha, Umi Afifah Finayanti, Siti Nisrohah, Ilahana, Maliya Husni, Chandra Febriyanti, Ela, Mustakim, Diny Prihatini dan Novia Sri Lestari

MOTTO

Natas, Nitis, Netes

(From God we come, In God we life, and unite God we return)

Kawula mung saderma, mobah-mosik karsaning

(Lakukan yang kita bisa, setelahnya serahkan kepada Tuhan)

Hyang Sukmo

ABSTRAK

SUTIRAH. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Belanja Modal adalah bentuk pengeluaran pemerintah daerah untuk menambah masa manfaat jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi belanja modal yaitu pendapatan asli daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan dana perimbangan. Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan asli daerah, Lain-lain pendapatan yang sah, dan dana perimbangan terhadap Pengalokasian anggaran belanja modal.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Kuantitatif. Metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi melalui data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah tahun anggaran 2017-2020. Sampel yang digunakan sebanyak 140 sampel. Teknik pengambilan sampel dengan metode sampel jenuh. Teknik analisis yang digunakan adalah metode asumsi klasik dan regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Kata kunci : Pendapatan asli daerah, Lain-lain pendapatan yang sah, Dana perimbangan, Belanja modal

ABSTRACT

SUTIRAH. The Influence of Regional Original Income, Other Legitimate Income, and Regional Balancing Funds on the Allocation of the Capital Expenditure Budget. The Influence of Regional Original Income, Other Legitimate Income, and Regional Balancing Funds on the Allocation of the Capital Expenditure Budget.

Capital Expenditure is a form of local government expenditure to increase the long-term useful life. Factors affecting capital expenditures are local revenue, other legitimate income, and balancing funds. This study aims to examine the effect of regional original income, other legitimate income, and balancing funds on the allocation of the capital expenditure budget.

This research belongs to the type of quantitative research. The data collection method is a documentation method through secondary data obtained from the Central Java Statistics Agency (BPS) for the 2017-2020 fiscal year. The samples used were 140 samples. The sampling technique is the saturated sample method. The analysis technique used is the classical assumption method and multiple linear regression using the SPSS version 25 application.

The results of this study indicate that partially local revenue has a positive and significant effect on the allocation of the capital expenditure budget, other legitimate income has a negative and significant effect on the allocation of the capital expenditure budget, while balancing funds have no significant effect on the allocation of the capital expenditure budget.

Key words : Regional original income, Other legitimate income, Balancing fund, Capital expenditure

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Landasan Teori	12
B. Telaah Pustaka.....	22
A. Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Setting Penelitian.....	37
C. Populasi dan Sampel.....	38
D. Variabel Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum	50
B. Deskripsi Data Penelitian.....	50
C. Analisis Deskriptif.....	53
D. Uji Asumsi Klasik	55
E. Uji Linear Berganda	61
F. Uji Hipotesis.....	63
G. Pembahasan Hipotesis	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Keterbatasan Penelitian.....	75
C. Implikasi Teoritis dan Praktis	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	I
1. Lampiran 1	I
2. Lampiran 2.....	III
3. Lampiran 3.....	V
4. Lampiran 4.....	VII
5. Lampiran 5.....	VIII
6. Lampiran 6.....	IX
7. Lampiran 7.....	IX
8. Lampiran 8.....	X
9. Lampiran 9.....	X
10. Lampiran 10.....	XI
11. Lampiran 11	XI
12. Lampiran 12.....	XI
13. Lampiran 13.....	XII
14. Lampiran 14.....	XII
15. Lampiran 15.....	XIII

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Landasan Teori	12
B. Telaah Pustaka.....	22
A. Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Setting Penelitian.....	37
C. Populasi dan Sampel.....	38
D. Variabel Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum	50
B. Deskripsi Data Penelitian.....	50
C. Analisis Deskriptif.....	53
D. Uji Asumsi Klasik	55
E. Uji Linear Berganda	61
F. Uji Hipotesis.....	63
G. Pembahasan Hipotesis	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Keterbatasan Penelitian.....	75
C. Implikasi Teoritis dan Praktis	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	I
1. Lampiran 1	I
2. Lampiran 2.....	III
3. Lampiran 3.....	V
4. Lampiran 4.....	VII
5. Lampiran 5.....	VIII
6. Lampiran 6.....	IX
7. Lampiran 7.....	IX
8. Lampiran 8.....	X
9. Lampiran 9.....	X
10. Lampiran 10.....	XI
11. Lampiran 11	XI
12. Lampiran 12.....	XI
13. Lampiran 13.....	XII
14. Lampiran 14.....	XII
15. Lampiran 15.....	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran daerah adalah dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi terkait pemasukan dan pengeluaran dana yang digunakan untuk mendanai program-program yang di rancang oleh lembaga pemerintah (Mardiasmo, 2018, h. 76). Penganggaran merupakan proses yang sangat vital bagi lembaga pemerintahan, karena anggaran mempunyai peran penting dalam menentukan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat serta sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada publik. Dengan adanya pertanggungjawaban dan keterbukaan yang harus dilakukan pemerintah daerah kepada publik, oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya untuk mengelola keuangannya secara efektif dan efisien (Afnisah, 2020). Di Indonesia, anggaran daerah dikenal dengan APBD. Komponen dalam APBD terdiri dari pemasukan yang bersumber dari pendapatan daerah, pengeluaran digunakan untuk belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang digunakan untuk menutup anggaran defisit (Mardiasmo, 2018).

Anggaran modal/belanja modal merupakan anggaran yang dikeluarkan pemerintah dengan masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan memungkinkan dapat menambah kekayaan pemerintah (Mardiasmo, 2018, h. 83). Pentingnya pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal dengan tujuan untuk menambah aset atau

kekayaan daerah baik sarana maupun prasarana sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah yang berpengaruh terhadap peningkatan produktifitas perekonomian (Afnisah, 2020).

Dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan publik baik sarana dan prasarana publik tentunya pemerintah memerlukan sejumlah anggaran, karena pada dasarnya pemerintah tidak memiliki uang sendiri, melainkan aliran dana yang diterima pemerintah berasal dari uang publik (Mardiasmo, 2018, h. 77). Dengan demikian pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan penerimaan daerahnya dalam mengupayakan peningkatan sumber penerimaan daerah. Berikut data pendapatan daerah Kab\Kota JATENG tahun 2017-2020:

Tabel 1.1 Penerimaan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan Daerah

Jenis Penerimaan	Kab/Kota Se-Jawa Tengah			
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pendapatan Asli Daerah	14,481	13,001	14,228	14,396
2. Lain-lain Pendapatan yang Sah	14,805	16,725	18,799	18,023
3. Dana Perimbangan	45,261	45.777	47,154	47,656

(Sumber: dokumen Ringkasan laporan Realisasi Anggaran)

Pada tabel di atas memperlihatkan pendapatan daerah dalam kurun waktu empat tahun. Pendapatan asli daerah memperlihatkan bahwa dari tahun 2017 besaran anggaran dana yang dikumpulkan yaitu 14,481 triliun, tahun 2018 justru mengalami penurunan sebesar 1,480 triliun, tahun 2019 pemda mampu meningkatkan kembali menjadi 14,228 triliun dan untuk tahun 2020 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 14,396 triliun. Untuk anggaran lain-lain pendapatan yang sah anggaran yang diperoleh di tahun 2017 sebesar 14,805 triliun, tahun 2018 sebesar 16,725 triliun, tahun 2019 sebesar 18,799 triliun, dan untuk tahun 2020 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 18,023 triliun, artinya anggaran selalu mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya. Jika dilihat berdasarkan tabel sumber penerimaan terbesar yang diterima pemda yaitu bersumber dari dana transfer atau dana perimbangan, kucuran dana yang diberikan pemerintah pusat untuk daerah bertujuan untuk melakukan pemerataan keuangan daerah. Anggaran dana transfer tahun 2017 sebesar 45,261 triliun, tahun 2018 sebesar 45,777 triliun, dan pada tahun 2019 sebesar 47,154 triliun, dan untuk tahun 2020 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 47,656 triliun peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah masih tinggi.

Pendapatan daerah merupakan faktor penentu terpenuhinya pelayanan publik, dengan pendapatan daerah yang tinggi mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja modal sebagai tujuan pemenuhan pelayanan publik pun meningkat.

Namun berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan menurut Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa sejumlah daerah masih banyak ditemukan minimnya alokasi dari belanja modal dan lebih banyak pemda mengeluarkan untuk belanja pegawai. Kisaran persentase belanja modal berada pada kisaran 12% itupun dibagi dengan rapat pegawai dan masyarakat (Kristianus, 2021). Artinya dalam alokasi anggaran yang dilakukan masih terjadi salah sasaran pada bidang yang bukan menjadi prioritas. Dalam hal ini termasuk Kabupaten/Kota Jawa Tengah, adapun perbandingan persentase belanja modal dengan belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Perbandingan Belanja Pegawai dan Belanja Modal Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2017-2020 (dalam jutaan rupiah)

No.	Tahun	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Total Belanja Daerah	% Belanja Modal	% Belanja Pegawai
1.	2017	28,526	14,619	74,502	20%	38%
2.	2018	14,010	29,062	76,157	18%	38%
3.	2019	13,414	29,480	80,182	17%	37%
4.	2020	11,731	31,900	83,654	14%	38%

(Sumber : Badan Pusat Statistik)

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa kab/kota Jateng T.A 2017 hingga 2020 persentase alokasi belanja modal lebih rendah jika dibandingkan dengan alokasi belanja pegawai. Berdasarkan persentase

belanja modal tertinggi hanya pada tahun 2017 dan untuk tahun selanjutnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini menyebabkan kemampuan daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui pemenuhan pelayanan publik masih kurang optimal. Jika dilihat dari kegunaannya pengalokasian anggaran untuk belanja modal merupakan faktor penting dalam mensejahterakan masyarakatnya, serta terpenuhinya fasilitas publik yang mempengaruhi kemajuan produktivitas perekonomian daerah (Sari, 2021).

Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan cara pemerintah daerah mengubah komposisi belanjanya untuk lebih produktif (Angelina dkk, 2020), serta meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah yang mempengaruhi alokasi belanja modal. Dari hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah dalam mengoptimalkan anggaran untuk belanja modal (Kusumaningrum & Sugiyanto, 2021). Dalam mengalokasikan belanja modal Pemda harus memperhatikan dengan baik tingkat rata-rata alokasi belanja modal sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. 27/2013 pada lampiran II bahwa alokasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 30% dari total belanja daerah (Sari, 2021).

Dalam memenuhi kebutuhan daerah pemerintah memerlukan sejumlah dana untuk meningkatkan pelayanan publik, maka daerah memiliki beberapa sumber pendapatan yang salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), perolehan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri (Mubasiroh, 2018). Salah satu sumber penerimaan terbesar dari

PAD ialah pajak dan retribusi. Besar kecilnya pendapatan akan sangat berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah. bertambahnya PAD, maka bertambahnya pula pengeluaran pemerintah atas belanja modal. Menurut hasil riset yang sebelumnya telah dilakukan oleh Jayanti (2020) membuktikan bahwa PAD mempengaruhi pemerintah untuk melakukan alokasi anggaran belanja modalnya, hasil temuan yang didapat oleh Jayanti sebanding dengan penelitian yang telah ditempuh oleh Saifudin dan Siswanti (2020), temuannya membuktikan bahwasannya secara positif dan signifikan PAD mempengaruhi keputusan pemerintah mengeluarkan anggarannya untuk belanja modal. Akan tetapi merujuk riset yang telah ditempuh Prasetya (2017) temuannya membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh atas pendapatan yang diterima pemerintah dengan pengeluaran pemda untuk mengalokasikan belanja modal.

Faktor lain yang mempengaruhi pemda untuk mengalokasikan anggaran yakni sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari dana hibah dan dana darurat atau biasa disebut dengan lain-lain pendapatan yang ditetapkan secara sah oleh pemerintah (lain-lain pendapatan yang sah) (Saifudin & Siswanti, 2020). Dana-dana tersebut bersumber dari pemerintah, masyarakat, dan lain-lain yang ditetapkan pemerintah. Penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan dari pemerintah daerah, khusus dana darurat diperuntukkan untuk hal-hal yang mendesak (Susilowati dkk., 2021). Menurut temuan riset yang telah ditempuh oleh A.B. Setiawan (2019) membuktikan bahwa besarnya dana

yang diterima pemda melalui lain pendapatan yang disahkan oleh pemda dapat mempengaruhi pemda untuk mengalokasikan anggaran belanja modalnya. Tetapi hasil temuan yang didapat oleh Setiawan tidak sebanding dengan penelitian yang telah ditempuh oleh Farouq (2020), temuannya membuktikan bahwasannya anggaran lain pendapatan yang disahkan pemerintah tidak bisa mempengaruhi secara negatif pemda untuk mengalokasikan anggaran belanja modalnya.

Upaya pemda dalam mendanai seluruh kegiatan operasionalnya tidak sama, setiap daerah tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengurangi terjadinya ketimpangan fiskal setiap daerah. Oleh karena itu upaya yang dilakukan pemerintah pusat yakni dengan memberikan dana bantuan atau dana transfer (dana perimbangan), salah satunya untuk mengatasi ketimpangan tersebut dengan melakukan pemerataan keuangan antar wilayah. Apabila pemerintah pusat memberikan sejumlah dana dalam bentuk bantuan dengan kisaran yang cukup besar, maka pemda dalam melakukan alokasi anggaran untuk belanja modalpun akan tinggi, dan dialokasi semestinya pada kebutuhan prioritas publik. Dengan demikian jika dana perimbangan meningkat, maka diikuti pula peningkatan pada alokasi belanja modalnya. (Novianto & Hanafiah, 2015).

Sebagaimana temuan hasil riset yang telah dilakukan Permata & Riharjo (2016) membuktikan bahwa kucuran dana yang diberikan pemerintah pusat untuk daerah tidak dapat mempengaruhinya, artinya

besarnya anggaran dari pemerintah pusat untuk daerah tidak mempengaruhi pemda untuk mengalokasikan anggaran belanja modalnya, hasil temuan tersebut tidak sejalan yang dilakukan Malau dkk., (2020) membuktikan bahwa besarnya dana perimbangan (DP) mampu mempengaruhi pemda untuk belanja modal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?
2. Apakah Lain-lain Pendapatan Yang Sah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
2. Untuk mengetahui pengaruh Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terhadap pengalokasiaan anggaran belanja modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan riset ini bisa memberikan kegunaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Riset diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memperkaya wawasan keilmuan berkaitan dengan belanja modal.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah (JATENG)

Diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukan kepada PEMDA Kab/Kota Jawa Tengah agar dapat mengelola keuangannya lebih baik untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk kepentingan publik.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan penelitian yang relevan dengan indikator variabel yang lebih kompleks.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam menambah wawasan keilmuan masyarakat terkait pengelolaan anggaran APBD yang dialokasikan untuk kepentingan publik.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan di dalam penelitian ini mempunyai 5 bab serta mempunyai sistematika seperti di bawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup penjelasan permasalahan riset yang dijelaskan dalam latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah, menjelaskan tujuan dan manfaat dari riset, serta menjelaskan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mencakup penjelasan teori yang relevan dengan riset dari beberapa referensi yang berupa definisi teori, telaah pustaka, dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan mengenai metode atau teknik yang diperlukan dalam riset, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisikan terkait analisis setelah pengujian dilakukan menggunakan metode penelitian yang diterapkan dan menjabaran hasil dari pengolahan data.

BAB V PENUTUP

Bagian ini mencakup kesimpulan yang didapatkan setelah dilakukan penelitian, keterbatasan dari penelitian ini serta saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta hasil pengujian yang telah dijabarkan pada halaman sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan berikut ini:

1. Pendapatan Asli Daerah secara positif dan signifikan mempengaruhi pemda untuk dapat melakukan alokasi anggaran pada belanja modalnya. Artinya semakin tingginya PAD yang dimiliki pemerintah daerah maka kemampuan daerah untuk membiayai belanja daerah akan semakin besar pula.
2. Lain-lain Pendapatan Yang Sah secara negatif dan signifikan mempengaruhi pemda untuk dapat melakukan alokasi anggaran pada belanja modalnya, yang berarti dengan kenaikan anggaran lain pendapatan yang disahkan pemerintah, maka kemampuan pemda dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal akan tetap rendah.
3. Dana Perimbangan Daerah secara positif dan signifikan tidak dapat mempengaruhi pemda untuk melakukan alokasi anggaran pada belanja modalnya. Artinya besar kecilnya dana transfer pusat ke daerah tidak mempengaruhi besar kecilnya alokasi belanja modal.

B. Keterbatasan dan Saran

Dari hasil analisis dan juga penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran yang dijelaskan berikut ini:

1. Riset ini hanya menggunakan sampel sebanyak 140 data, dari 35 Kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan mengembangkan riset dengan meneliti Kabupaten/Kota yang berada diluar Jawa atau seluruh Indonesia dan data yang lebih lengkap dengan rentan waktu yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang relevan.
2. Koefisien determinasi menghasilkan bahwa untuk nilai *Adjusted R²* sebesar 0,125, Hasil tersebut dapat menjelaskan bahwa pengalokasian anggaranbelanja modal hanya dipengaruhi pendapatan asli daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan dana perimbangan sebesar 12,5%, sisanya yaitu 87,5% pengalokasian anggaran belanja modal dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel, seperti Pertumbuhan Ekonomi, SILPA, Belanja Pegawai, dan Ukuran pemerintah, dll.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dan setiap pemerintah daerah dengan konsisten untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali lebih banyak sumber-sumber pendapatan asli daerah setiap tahunnya, sehingga menunjukkan

bahwa daerah telah mempunyai tingkat kemandirian yang tinggi dalam mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal, dan memperhatikan setiap anggaran yang dialokasikan semestinya untuk pelayanan publik.

C. Implikasi Teoritis dan Praktis

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta hasil yang diperoleh dalam pengujian riset ini, maka implikasi dalam riset dijelaskan berikut ini:

1. Implikasi Teoritis

Mampu memberikan kontribusi untuk perkembangan teori penganggaran sektor publik khususnya dalam anggaran belanja modal.

2. Implikasi Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah (JATENG)

Mampu dijadikan acuan pemda dalam melakukan peningkatan anggaran yang memprioritaskan pengalokasian anggaran belanja modal, karena berdasarkan hasil riset bahwa PAD dapat mempengaruhi pemda dalam mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal. Dengan demikian mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran untuk belanja modal mempunyai peranan penting dalam kesejahteraan masyarakat dan daerahnya dengan tepat sasaran.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Mampu memberikan kemudahan bagi pihak lain yang membutuhkan referensi atau rujukan yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran untuk belanja modal.

c. Bagi Masyarakat

Mampu memberikan informasi rinci terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan alokasi anggaran modal salah satunya melalui peningkatan pendapatan daerah, maka masyarakat harus memperhatikan pula peningkatan pendapatan yang lebih tinggi khususnya dalam perpajakan dana retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnisah, A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Dan Jawa Timur Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. Universitas Sumatera Utara.
- Angelina, C., Janice, Clarina, C., Fanjaya, W., & Jesisca. (2020). Pengaruh PE , PAD , DAU dan SiLPA terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Utara). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 4(1), 138–147. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.182>
- Anjani, E. S. D., Akram, & Handajani, L. (2015). Faktor Penentu Belanja Modal dan Konsekuensinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Nusa Tenggara Barat. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–25.
- Ardianto, J. F. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016- 2018). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bawono, A. (2018). *Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi dan Bisnis Islam Aplikasi dengan Eviews*. LPM Press.
- Dwi, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 8(2), 54–68.
- Endra, F. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)*. Zifatama Jawa.
- Faraouq, J., Sukmadilaga, C., & Mulyana, A. R. (2020). Analisis Determinan Pengalokasian Belanja Modal. *SENTRINOV*, 6(2).
- Ferdian, Y. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Terhadap Belanja Daerah. Universitas Negeri Padang.
- Fuad, K. (2017). Model Alokasi Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk Kemaslahatan Ummat. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 41–62.
- Hasan, I. (2009). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara.
- Imamah, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pemerintah

Daerah di Provinsi Jawa Timur. Universitas Bhayangkari Surabaya.

- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3), 335–341. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.30045>
- Kanaiya, I. P. C., & Mustanda, I. K. (2020). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pemerintah. *E-Jurnal Manajemen*, 9(3), 1109–1128.
- Kristianus, A. (2021). Kemdagri Minta Pemda Tingkatkan Alokasi Belanja Modal. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/769737/kemdagri-minta-pemda-tingkatkan-alokasi-belanja-modal>
- Kusumaningrum, E. B., & Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Fiscal Stress, dan Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 27(2), 630–643.
- Latan, H., & Temalagi, S. (2013). Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0. Alfabeta.
- Luh Putu Rani Mayasari, Sinarwati, N. K., & Yuniarti, G. A. (2014). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI AK Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Malau, E. I., Calen, C., Siregar, V. M. M., & Saragih, K. Y. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Owner*, 4(1), 356–361. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.168>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI Yogyakarta.
- Maulana, I. A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah. *Ekonomika*, 15(1), 86–105.
- Mubasiroh, L. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nasution, D. A. D. (2019). *Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah)*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Novianto, R., & Hanafiah, R. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana

perimbangan, dan kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*, 4(1), 1–22.

Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 91–95.

Nurdiawati, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di Jawa Tengah. *JURNAL APLIKASI BISNIS*, 17(1), 43–59.
<https://doi.org/10.20885/jabis.vol17.iss1.art3>

Nurkholis, & Moh. Khusaini. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. UB Press.

Permata, W., & Riharjo, B. . (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal (Jawa Timur). *Journal of Science and Accounting Research*, 5(9), 1–15.

Prasetya, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Belanja pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). Universitas Negeri Padang.

Rizza, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2018. Universitas Pancasakti Tegal.

Rosiana, Y. O. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Saifudin, & Siswanti, E. A. (2020). Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap pengalokasian belanja modal : studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Majalah Ilmiah Solusi*, 18(4), 55–68.

Salsabila, N. F., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Seluruh Provinsi Di Indonesia Tahun 2019 dan 2020). *E-Proceeding of Management*, 8(5), 5279–5285.

Sandi, D. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 133–152.

Sari, D. G. Y. A., Kepramareni, P., & Novitasari, N. L. G. (2017). Pengaruh

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*; 9(1), 15–29.

Sari, K. (2021). Analisis Kemampuan Keuangan daerah dan Fiscal stress Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Sumatera Bagian Selatan. Universitas Sriwijaya.

Setiawan, A. B. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Anggaran. *JURNAL AKUNIDA*, 5(1), 1–9.

Simbolon, Y. C., Maksum, A., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 826–839.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing.

Sujarweni, V. W. (2016). Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi Dengan SPSS. Pustaka Baru Press.

Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli daerah, dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 183–191.

Susilowati, D., Sitinjak, C. A. D., & Christine April Dayanti Sitinjak, J. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(01), 115–126.

Wikipedia. (2021). Jawa Tengah. Wikipedia Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah

Yusuf, M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Prenadamedia Group.